

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Prostitusi dan Lokalisasi

Kata prostitusi berasal dari perkataan latin *prostituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan.²⁶ Jadi prostitusi adalah suatu transaksi antara si perempuan pelacur dan si pemakai jasa pelacur yang memberi sejumlah uang untuk interaksi seksual.²⁷

HMK Bakry menyatakan bahwa prostitusi itu sama kekuatannya dengan zina. Prostitut ialah perempuan yang menyerahkan raganya kepada laki-laki untuk bersenang-senang dengan menerima imbalan yang ditentukan.

Dr. H. Ali Akbar juga mengajukan satu batasan, bahwa prostitusi itu adalah suatu perbuatan zina, karena perbuatan itu diluar perkawinan yang sah.²⁸

Diberbagai negeri ada juga pelacuran yang teratur, dibawah pengawasan pemerintah, dilokalisir. Ada pelacur-pelacur yang hidup dari pelacuran sebagai mata pencaharian, ada yang hanya kadang-kadang saja

²⁶ Simandjuntak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 112.

²⁷ Ratna Saptari, BrigitteHolzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: kalyanamitra, 1997), hal. 391.

²⁸ Sapari Imam Asyari, *Patologi Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 72.

praktek. Ada pelacur-pelacur yang menyediakan tubuhnya untuk setiap orang, juga ada yang disebut “*demi mondaines*” (pelacur tingkat atasan) dan *amatrices*”, yang menyerahkan tubuhnya hanya kepada beberapa orang saja.²⁹

Diantara langkah yang telah dilakukan diberbagai negara dalam usahanya mengatasi masalah prostitusi ini diantaranya, ada yang berusaha melokalisir prostitusi dan ada pula yang membiarkan saja tanpa mengambil usaha melokalisasikan pelacur. Kesemua itu bukan jaminan menyelesaikan masalah.

Alasan-alasan untuk melokalisir tentu saja dipandang suatu langkah yang tampaknya baik, karena dengan langkah itu ada beberapa manfaat, yaitu:

- a. Pengawasan terhadap pelaku prostitusi dapat lebih berdaya mampu, baik menyangkut pelacur yang bertempat dilokasi itu, maupun pada pengunjung, terutama menyangkut usia yang akan masuk daerah lokasi itu.
- b. Lokalisasi itu memberi kemudahan untuk memberikan penerangan, ceramah, serta dakwah dan berbagai jenis kegiatan yang lain, seperti pelayanan dan pengawasan kesehatan, pemberian keterampilan maupun pendidikan atau pembinaan yang lain.
- c. Jam prakteknya pun dapat diatur.

²⁹ Simandjuntak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 113.

Sedangkan segi negatif dari lokalisasi pelacuran ini, antara lain:

- a. Dengan lokalisasi akan memudahkan orang berbuat iseng.
- b. Ada anggapan seolah-olah pemerintah menyetujui perbuatan tersebut atau dengan kata lain lokalisasi berarti legalisasi perbuatan pelacuran tersebut.³⁰

2. Jenis Prostitusi dan Lokalisasi

Jenis prostitusi dapat dibagi menurut aktivitasnya yaitu terdaftar dan terorganisir, dan yang tidak terdaftar.

- a. Prostitusi yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian, yang dibantu dan bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Pada umumnya mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan, dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan dan keamanan umum.

- b. Prostitusi yang tidak terdaftar

Termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisir, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa disembarang tempat, baik mencari mangsa sendiri maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat

³⁰ Sapari Imam Asyari, *Patologi Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hal. 74-75.

diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

Menurut jumlahnya, prostitusi dapat dibagi dalam:

- 1) Prostitusi yang beroperasi secara individual, merupakan *single operator*. Atau
- 2) Prostitusi yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur rapi. Jadi mereka itu tidak bekerja sendirian akan tetapi diatur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.

Noeleen Heyzer membedakan tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak pengelola bisnis pelacuran, yaitu:

- 1) Mereka bekerja sendiri tanpa calo atau majikan. Sering kali mereka beroperasi di pinggir jalan atau keluar masuk satu bar ke bar lain.
- 2) Mereka memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. Calo atau perantara bisa “germo” yang mengkhususkan diri pada bisnis pelacuran, pemilik club malam, guide turis baik lokal maupun asing, supir taksi atau pegawai hotel. Biasanya si pelacur sendiri hanya memperoleh sebagian kecil dari uang yang dibayarkan oleh kliennya.
- 3) Mereka berada langsung di bawah naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub panti pijat, tempat lokalisasi dan hotel-hotel.³¹

³¹ Ratna Saptari, BrigitteHolzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: kalyanamitra, 1997), hal. 391.

Sedang menurut tempat penggolongan atau lokasinya, prostitusi dapat dibagi menjadi:

- 1) *Segregasi* atau lokalisasi, yang terisolir atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Komplek ini dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau petak-petak daerah tertutup.
- 2) Rumah-rumah panggilan (*call houses* tempat *rendezvous*, *parlour*).
- 3) Dibalik *front* organisasi atau dibalik *business-business* terhormat. (apotik, salon kecantikan, rumah makan, tempat mandi uap dan pijat, anak wayang, sirkus dan lain-lain).³²

3. Penanggulangan Prostitusi

Pada garis besarnya, usaha untuk mengatasi masalah tuna susila ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Usaha yang bersifat *preventif*

Usaha yang bersifat *preventif* diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa:

- 1) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan pelacuran.
- 2) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 240-242.

- 3) Menciptakan bermacam-macam kesibukan dan kesempatan bagi anak-anak puber dan *adolesens* untuk menyalurkan kelebihan energinya.
 - 4) Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya, serta mendapatkan upah/gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya.
 - 5) Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga.
 - 6) Pembentukan badan atau team koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, yang dilakukan oleh beberapa instansi. Sekaligus mengikut sertakan potensi masyarakat lokal untuk membantu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penyebaran pelacuran.
 - 7) Penyitaan terhadap buku-buku dan majala-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru dan sarana-sarana lain yang merangsang nafsu seks.
 - 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.
- b. Tindakan bersifat *represif* dan *kuratif*

Sedang usaha yang *represif* dan *kuratif* dimaksudkan sebagai: kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan para wanita dari ketuna susilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan benar.

Usaha *represif* dan *kuratif* ini antara lain berupa:

- 1) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitue serta lingkungannya.
- 2) Untuk mengurangi pelacuran, diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila rehabilitasi dan resosialisasi ini dilakukan melalui pendidikan moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan agar mereka bersifat kreatif dan produktif.
- 3) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tuna susila yang terkena razia, disertai pembinaan mereka, sesuai bakat dan minat masing-masing.
- 4) Pemberian suntikan dan pengobatan pada interval waktu tetap untuk menjamin kesehatan para prostitue dan lingkungannya.
- 5) Menyediakan lapangan kerja baru bagi mereka yang bersedia meninggalkan profesi pelacuran dan mau memulai hidup susila.
- 6) Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga para pelacur dan masyarakat asal mereka, agar mereka mau menerima kembali bekas-bekas wanita tuna susila itu mengawali hidup baru.
- 7) Mencarikan pasangan hidup yang permanen/ suami bagi para wanita tuna susila, untuk membawa mereka ke jalan benar.

- 8) Mengikuti sertakan ex WTS (bekas wanita tuna susila) dalam usaha transmigrasi, dalam rangka pemerataan penduduk di tanah air dan perluasan kesempatan kerja bagi kaum wanita.³³

4. Peraturan Daerah Tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi

Kebijakan penutupan tempat-tempat lokalisasi, khususnya lokalisasi yang ada di Surabaya. Sebagaimana berdasarkan peraturan daerah no.7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kotamadya daerah tingkat II Surabaya.

Berikut jadwal pemerintah kota Surabaya dalam rangka penutupan 5 lokalisasi yang ada di Surabaya:³⁴

- a. Gang Dolly kelurahan Putat Jaya: 18 Juni 2014
- b. Dupak Bangunsari: 21 Desember 2012
- c. Tambak Asri atau Kermil kelurahan Monokrembangan: 28 Mei 2013
- d. Klakahrejo kelurahan Klakahrejo: 25 Agustus 2013
- e. Sememi Jaya kelurahan Sememi: 23 Desember 2013

5. Faktor Penyebab Penutupan Lokalisasi Prostitusi

Berbicara tentang faktor penyebab penutupan lokalisasi prostitusi, maka tidak lepas dari akibat-akibat yang ditimbulkan dari prostitusi sendiri, diantaranya yaitu:

- a. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit.
- b. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga.

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 254-256.

³⁴ www.surabaya.go.id-Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya. htm, diakses pada tanggal 25 Juni 2014, pukul 09.00 WIB.

- c. Mendemoralisir atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan, khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
- d. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain).
- e. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama.
- f. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain.³⁵

Penutupan lokalisasi merupakan bentuk dari resosialisasi dari pemerintah kota Surabaya. Resosialisasi yang didahului oleh desosialisasi, yaitu proses “pencabutan” diri yang dimiliki seseorang, merupakan resosialisasi yang bersifat sangat kuat dan keras. Resosialisasi ini berlangsung dalam institusi total (*total institution*), yaitu suatu tempat dimana sejumlah orang terputus dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu hidup bersama dan hampir sepenuhnya berada di bawah pengendalian para pejabat yang mengelola tempat ini secara formal seperti penjara, kamp konsentrasi, biara, dan kamp pelatihan tentara. (Goffman 1961).

Resosialisasi dapat terjadi dalam bentuk sosialisasi antisipatoris, yaitu sosialisasi yang terjadi bagi orang yang akan memainkan suatu peran baru. Belajar memainkan peran sebelum memegang peranan ini terjadi dalam berbagai aktivitas masyarakat.³⁶

³⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 238-239.

³⁶ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 67-68.

6. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Klakahrejo RW 02 Pasca Penutupan Lokalisasi Moroseneng

Salah satu faktor penyebab seseorang menjadi pelacur adalah karena tekanan ekonomi. Berdasarkan penelitian Korch, sebagaimana diungkapkan oleh Parsudi Suparlan, perempuan adalah komoditi dan ketika akses ekonomi tidak mereka dapatkan maka jalan pintas yang dapat dilakukannya adalah menjual dirinya sendiri (menjadikan dirinya sebagai pelacur). Perempuan adalah komoditi untuk pasar kerja, baik sebagai tenaga kerja murah ataupun sebagai komoditi hiburan.

Menjadi pelacur bisa juga disebabkan oleh adanya struktur sosial yang timpang. Berdasarkan analisis Marxian, disparitas pendapatan yang terlalu njomplang antara golongan kaya dan miskin atau antara majikan dan pekerja pada gilirannya akan melahirkan suatu situasi alienasi. Struktur sosial yang timpang akan mendorong semakin banyaknya pelacur baru yang bermunculan dan bisa menyebabkan lahirnya “pasar raya seks” di kota-kota besar, terutama di negara-negara berkembang.³⁷

Ada juga penyebab seseorang menjadi pelacur karena:

a. Keadaan ekonomi rumah tangga perempuan pelacur

Dalam banyak hal masuknya seseorang dalam dunia pelacuran memang disebabkan faktor ekonomi.

³⁷ Nur Syam, *Agama Pelacur* (Yogyakarta: Lkis, 2010), hal. 69-70.

b. Pandangan tentang seksualitas

Orang yang diketahui (atau dianggap) telah kehilangan keperawanannya akibat peristiwa perkosaan atau terbujuk oleh seorang laki-laki sering kali mendapat cap buruk. Karenanya kemudian muncul pandangan bahwa sekali sudah “rusak” nama baik tidak akan bisa diperoleh kembali. Akibatnya, tak ada jalan lain bagi mereka kecuali masuk kedalam peran yang diciptakan untuk mereka.

c. Bisnis pelacuran dengan sistem paksaan dan kekerasan

Sistem hierarki antara pelacur dengan para calo atau pemilik usaha pelacuran terdapat ikatan-ikatan yang sangat mengekang si pelacur sehingga tak mungkin keluar dari jeratan si germo.³⁸

Menurut Gavin Jones, “kelompok-kelompok aktivitas yang berkaitan dengan pelacuran merupakan sumber utama pekerjaan perempuan di kota-kota Asia Tenggara dan berbeda dengan pelayanan rumah tangga tampak tidak memiliki hubungan yang jelas dengan perkembangan ekonomi.”³⁹

Setiap tempat lokalisasi biasanya akan menarik yang lainnya untuk melakukan usaha-usaha ekonomis, seperti pedagang kaki lima, penjual keliling, dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, seperti makelar seks.⁴⁰

³⁸ Ratna Saptari, BrigitteHolzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: kalyanamitra, 1997), hal. 392.

³⁹ Alison J. Murray, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), hal. 126.

⁴⁰ Alison J. Murray, *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1995), hal. 124-125.

7. Perspektif Agama dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Pelacuran

a. Perspektif Agama

Program studi sosiologi merupakan program studi yang berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Maka dari itu tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman. Sehingga dalam penelitian tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Klakahrejo RW 02 pasca penutupan lokalisasi Moroseneng, peneliti mencantumkan perspektif agama terhadap pelacuran.

Norma agama pada umumnya juga melarang pelacuran:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu sekali-kali melakukan perzinaan, sesungguhnya perzinaan itu merupakan perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk (Q.S. Al Isra: 32)

Sebab perzinaan yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan itu melanggar kesopanan, merusak keturunan, menyebabkan penyakit kotor, menimbulkan persengketaan, ketidakkaruan dalam keluarga dan malapetaka lainnya.⁴¹ Pelacuran, pedagang kaki lima, pedagang jalanan, tukang parkir dan jasa salon adalah strategi mempertahankan hidup bagi golongan ekonomi lemah. Melalui transaksi yang seperti ini masyarakat dapat mempertahankan kehidupannya di tengah geliat ekonomi kapitalistik yang semakin mencengkram.

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), hal. 181.

Ayat lain yang juga menjelaskan tentang hukuman bagi pelacuran, sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٢﴾

Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah, kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaknya hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (Q.S. An Nur:02)

b. Perspektif Hukum Positif Indonesia

1) Pasal 296 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

2) Dan pasal 506 KUHP yang berisi:

Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.⁴²

⁴² Made Dharma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 101-102.

8. Penutupan Lokalisasi dan Perubahan Sosial

Penutupan lokalisasi akan membawa perubahan pada masyarakat. Baik perubahan pada bidang sosial maupun perubahan pada bidang ekonomi.

Menurut Gillin John dan John Philip Gilin, perubahan sosial diartikan sebagai variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material,, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Samuel Koenig juga mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia, modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.⁴³

Salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi sebab faktor penutupan lokalisasi, salah satunya yaitu terjadi penyesuaian diri (*adjustment*) baik bagi para wanita tuna susila, mucikari maupun masyarakat yang berada disekitar lokalisasi.

Adjusment adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Proses penyesuaian diri itu merupakan reaksi terhadap tuntutan-tuntutan terhadap dirinya. Tuntutan-tuntutan tersebut dapat digolongkan menjadi tuntutan internal dan eksternal.

Tuntutan internal adalah tuntutan yang berupa dorongan atau kebutuhan yang timbul dari dalam, baik yang bersifat fisik maupun sosial, misalnya: kebutuhan makan, minum, seks, penghargaan sosial, persahabatan, kecintaan dan sebagainya.

⁴³ Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial Dalam Teori Makro* (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 16.

Untuk menilai berhasil tidaknya proses penyesuaian diri itu, ada empat kriteria yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Kepuasan psikis: penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan kepuasan psikis, sedangkan yang gagal akan menimbulkan rasa tidak puas yang menjelma dalam bentuk perasaan kecewa, gelisah, lesu, depresi dan sebagainya.
- b. Efisiensi kerja: penyesuaian diri yang berhasil akan nampak dalam kerja yang efisien dan sebaliknya jika gagal, maka kerja tidak efisien.
- c. Gejala-gejala fisik: penyesuaian diri yang gagal akan nampak dalam gejala-gejala fisik seperti, pusing, sakit perut dan sebagainya.
- d. Penerimaan sosial: penyesuaian diri yang berhasil akan menimbulkan reaksi setuju dari masyarakat, sedang yang gagal akan mendapatkan reaksi tidak setuju dari masyarakat.⁴⁴

Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perubahan diantaranya yaitu:

- a. Perubahan mengancam kepentingan yang sudah tetap

Golongan-golongan yang telah mewarisi hak-hak istimewa dalam kondisi yang sedang berlaku, tentu menentang perubahan tradisional.

- b. Perubahan menghancurkan kebiasaan

Manusia hidup atas dasar kebiasaan, dan kebiasaan itu akan hancur bila terjadi perubahan.

⁴⁴ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991), hal. 155-157.

c. Perubahan membawa pola-pola baru tingkah laku

Dengan munculnya pola-pola baru berarti lenyaplah pola-pola lama. Lenyapnya pola-pola kelakuan tradisional dan munculnya pola-pola baru menimbulkan ketegangan-ketegangan.⁴⁵

B. Kerangka Teoretik

Untuk menganalisis fenomena mengenai “Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat kelurahan Klakahrejo RW 02 kecamatan Benowo Surabaya Pasca Penutupan Lokalisasi Moroseneng”, lebih relevannya peneliti menggunakan teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons dan teori pertukaran George Homans.

1. Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parson

Fenomena sosial yang terjadi di kelurahan Klakahrejo RW 02 merupakan fakta riil yang benar-benar terjadi di masyarakat. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Klakahrejo RW 02 mengalami perubahan pasca penutupan lokalisasi Moroseneng. Peneliti mencoba melihat fenomena tersebut dengan menggunakan paradigma fakta sosial.

Fakta social dinyatakan sebagai barang sesuatu yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi objek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (Spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil diluar pemikiran manusia. Arti penting pernyataan Durkheim terletak pada usahanya untuk menerangkan bahwa fakta sosial tidak dapat dipelajari

⁴⁵ Simandjuntak, *Patologi Sosial* (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 29-30.

melalui instropeksi. Fakta sosial harus diteliti didalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lainnya.⁴⁶

Sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan salah satu teori yang terangkum dalam paradigma fakta sosial, yaitu teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen yang berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Ketika terjadi sedikit perubahan dimasyarakat maka akan mempengaruhi elemen yang lain. Dengan menggunakan asumsi dasar, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya.⁴⁷

Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Klakahrejo RW 02, yang mengalami perubahan pasca penutupan lokalisasi Moroseneng. Perubahan ini terjadi pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Klakahrejo RW 02. Agar perubahan yang terjadi pada masyarakat tidak membuat resah, maka pemerintah kota Surabaya memberi solusi dengan memberikan kompensasi dan pelatihan keterampilan bagi WTS dan mucikari, sedangkan untuk masyarakat yang terlibat didalamnya dibangun sentra PKL untuk usaha.

Semua perubahan yang terjadi pada masyarakat Klakahrejo RW 02 tersebut juga membutuhkan proses, agar perubahan yang terjadi dapat

⁴⁶George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 14.

⁴⁷ George,Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 21.

diterima oleh masyarakat. Selain itu juga masyarakat diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada pasca penutupan lokalisasi Moroseneng. Harapan kedepannya, agar masyarakat mampu menjalankan fungsinya masing-masing dan dapat hidup mandiri.

Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem. Keempat fungsi itu disebutnya AGIL. AGIL adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Diantaranya yaitu *Adaptation* (A), *Goal attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency (pattern maintenance)* (L). Demi keberlangsungan hidupnya, agar tetap bertahan (*survive*) maka suatu sistem atau semua bagian dari masyarakat harus memiliki fungsi-fungsi tersebut.⁴⁸ Berikut penjelasan dari keempat fungsi tersebut:

- a. *Adaptation* (adaptasi); sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
- b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan); sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- c. *Integration* (Integrasi); sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya yaitu *Adaptation*, *Goal attainment*, *Integration*.

⁴⁸George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 121.

- d. *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola); sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

2. Teori Pertukaran George Homans

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teori pendukung yaitu teori pertukaran atau *exchange theory* yang dibangun oleh George Homans. Teori pertukaran termasuk dalam paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya kepada hubungan antar individu dan lingkungannya. Tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku.⁴⁹

Serupa yang dialami oleh masyarakat Klakahrejo RW 02 atas kebijakan pemerintah kota Surabaya mengenai penutupan lokalisasi Moroseneng. Lokalisasi prostitusi mayoritas membawa pengaruh negatif bagi lingkungan masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar lokalisasi, sehingga pemerintah kota Surabaya melakukan penutupan di semua lokalisasi. Akan tetapi untuk melakukan penutupan lokalisasi tersebut, pemerintah kota Surabaya memberikan imbalan kepada masyarakat Klakahrejo RW 02 berupa pemberian kompensasi dan pelatihan keterampilan bagi WTS dan mucikari, sedangkan bagi

⁴⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 71-72.

masyarakat yang menggantungkan kehidupannya di lokasi Moroseneng oleh pemerintah kota Surabaya dibangun sentra PKL untuk usaha. Fenomena yang terjadi tersebut, membawa perubahan pada masyarakat Klakahrejo RW 02. Mulanya masyarakat yang berprofesi sebagai WTS akhirnya alih profesi menjadi pedagang, pedagang yang bejualan disekitar lokasi akhirnya pindah berjualan di tempat lain.

Menurut Homans, “teori ini membayangkan perilaku sosial sebagai pertukaran aktivitas, nyata atau tak nyata, dan kurang lebih sebagai pertukaran hadiah atau biaya, sekurang-kurangnya antara dua orang”.⁵⁰

Homans menyatakan bahwa sumber kebahagiaan manusia umumnya berasal dari hubungan sosial. Homans juga mengungkapkan bahwa ada empat prinsip teori pertukaran yang merupakan suatu deskripsi umum tentang unsur-unsur teori ini, yaitu:

- a. Satuan analisis dalam tatanan sosial adalah sesuatu yang diamati dalam penelitian dan memainkan peran penting dalam menjelaskan tatanan sosial individu.
- b. Motif pertukaran mengasumsikan bahwa setiap orang mempunyai keinginan sendiri. Setiap orang itu memerlukan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidaklah merupakan tujuan umum. Dengan demikian, teori ini berasumsi bahwa orang melakukan pertukaran karena termotivasi oleh gabungan dari berbagai tujuan dan keinginan yang khas. Motivasi dipandang sebagai suatu hal yang pribadi dan individual.
- c. Faedah atau keuntungan, keuntungan atau *cost* dapat didefinisikan sebagai upaya yang diperlukan guna memperoleh suatu kepuasan, ditambah dengan reward yang potensial yang akan diperoleh apabila melakukan sesuatu. Kepuasan atau *reward* yang diperoleh seseorang itu dapat dinilai sebagai sebuah keuntungan.
- d. Pengesahan sosial, merupakan suatu pemuas dan merupakan motivator yang umum dalam sistem pertukaran. Besarnya makna ganjaran tidaklah mudah untuk diberi batasan karena sifatnya yang individual dan emosional. Menurut teori pertukaran reward

⁵⁰ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta:Kencana, 2011), hal. 359.

ialah ganjaran yang memiliki kekuatan pengesahan sosial (*social approval*).⁵¹

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam tinjauan penelitian terdahulu ada beberapa penelitian yang relevan yang meneliti mengenai lokalisasi prostitusi, khususnya mengenai dampak dari keberadaan lokalisasi dan dampak penutupan lokalisasi, diantara penelitian yang relevan tersebut, yaitu penelitian dari:

1. Dampak Penutupan Lokalisasi atau Resosialisasi WTS Kramat Tunggak terhadap Masyarakat Kelurahan Tugu Utara, tesis ini disusun oleh Sutrisno tahun 2002, Universitas Indonesia.

Inti pembahasan pada tesis tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat Tugu Utara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang tidak mendukung penutupan lokalisasi. Sebagian besar kelompok yang tidak mendukung beralasan bahwa penutupan tersebut tidak dibarengi dengan upaya penanggulangan dampak yang akan muncul. Masyarakat kelurahan tugu utara juga menilai bahwa penutupan lokalisasi membawa keuntungan dan kerugian baik dari segi agama, ketertiban, ekonomi dan sosial.

2. Dampak Lokalisasi Moroseneng pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Klakahrejo Kecamatan Benowo Surabaya, skripsi ini disusun oleh Sri Sundari tahun 2004, fakultas Dakwah program studi Sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya.

⁵¹I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 174-176.

Inti pembahasan skripsi tersebut menyatakan bahwa adanya lokalisasi Moroseneng membawa dampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Klakahrejo Benowo Surabaya jika dibandingkan dengan sebelum adanya lokalisasi. Sebelum adanya lokalisasi bangunan rumah masyarakat masih berupa bambu dan berlantai tanah, sarana dan prasarana publik masih sederhana, tingkat ekonomi masih rendah dan pas-pasan, norma susila masih lekat dalam diri masyarakat. Berbeda setelah adanya lokalisasi, kini bangunan rumah masyarakat bertembok dan lantai keramik, sarana dan prasarana semakin baik dan terpenuhi, tingkat ekonomi mengalami perubahan yang pesat, norma susila yang ada semakin pudar dan perilaku masyarakat menjadi berubah suka mabuk-mabukan.

3. Penyakit menular Seksual (PMS) Dengan Kecenderungan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Karang Taruna Klakahrejo RW 02 Benowo Surabaya, skripsi ini disusun oleh Umi Farida tahun 2007, fakultas Dakwah program studi Psikologi IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Inti dari pembahasan skripsi tersebut ialah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang penyakit menular seksual dengan kecenderungan perilaku seks bebas pada remaja karang taruna Klakahrejo RW 02 benowo Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari faktor meningkatnya libido seksual, tabu larangan dan pergaulan bebas yang terjadi pada remaja karang taruna Klakahrejo RW 02 tersebut.

Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan tersebut, yaitu penelitian Sutrisno, Sri Sundari dan Umi Faridah. Dapat disimpulkan bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki titik perbedaan dan titik kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Fokus penelitian peneliti hampir sama dengan penelitian Sutrisno akan tetapi lokasi dan subyek penelitiannya berbeda. Lokasi penelitian Sutrisno berada di lokalisasi Kramat Tunggak Jakarta dan subyek penelitiannya adalah masyarakat kelurahan Tugu Utara. Sedangkan lokasi pada penelitian peneliti berada di lokalisasi Moroseneng Surabaya dan subyek penelitiannya adalah masyarakat kelurahan Klakahrejo RW 02.

Sedangkan penelitian Sri Sundari dengan penelitian ini, memiliki kesamaan lokasi dan subyek penelitian yaitu lokalisasi Moroseneng Surabaya dan juga masyarakat kelurahan Klakahrejo. Akan tetapi fokus pada penelitian ini adalah mengenai kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Klakahrejo RW 02 pasca penutupan lokalisasi Moroseneng. Berbeda dengan penelitian Sri Sundari, yang lebih menekankan pada dampak keberadaan lokalisasi Moroseneng terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Klakahrejo. Jadi, penelitian ini merupakan tindak lanjut dari penelitian Sri Sundari, yang mana penelitian ini membahas tentang bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Klakahrejo RW 02 pasca penutupan lokalisasi Moroseneng.

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian Umi Farida adalah terletak pada permasalahan penelitian. Penelitian Umi Faridah lebih

fokus membahas tentang pengetahuan tentang penyakit menular seksual yang ada di Klakahrejo RW 02 Benowo Surabaya namun penelitian ini lebih fokus pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat kelurahan Klakahrejo pasca penutupan lokalisasi Moroseneng. Akan tetapi dari penelitian ini memiliki lokasi dan obyek penelitian yang sama yaitu di daerah Klakahrejo RW 02.